



# Buletin Parlementaria

Nomor 1029/III/X/2018 • Oktober 2018



## DPR dan Parlemen Georgia Sepakat Bentuk GKSB



9 772614 339005

DPR Jadi Rujukan Parlemen Malaysia





Foto bersama Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dan Delegasi DPR RI dengan Ketua Parlemen Georgia H.E. Irakli Kobakhidze

## DPR dan Parlemen Georgia Sepakat Bentuk GKSB

**Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Parlemen Georgia menyepakati membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) dan menyetujui hubungan yang aktif pada ekonomi, pendidikan, pariwisata dan olahraga antar kedua negara. Secara umum, selama ini hubungan diplomatik Indonesia-Georgia berjalan dengan baik dan tidak ada ganjalan secara politis yang mengganggu hubungan kedua negara.**

“ Kita juga berharap Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Georgia segera dibuka. Mungkin tahapannya nanti kita lihat kesiapan Kementerian Luar Negeri, dan Duta Besar kita yang merangkap Ukraina dan Georgia juga mendukung,” jelas Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto usai memimpin pertemuan Delegasi DPR RI dengan Ketua Parlemen Georgia H.E. Irakli Kobakhidze di Gedung Parlemen Georgia, Tbilisi, Georgia, Selasa (02/10).



Foto: Eka/hr

antar parlemen kedua negara, mengenai tantangan keamanan dan politik asing, dimana menjadi sebuah kepentingan atas dukungan Indonesia ke Georgia.

“Indonesia memberikan pengakuan atas kemerdekaan Georgia pada tanggal 27 Juli 1992. Hubungan diplomatik kedua negara disepakati dalam Komunike Bersama yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 1993 dengan Keppres Nomor 88 Tahun 1993 tanggal 30 September 1993, KBRI Kyiv, Ukraina, merangkap Georgia,” kata Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) itu.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Ukraina merangkap Georgia Yuddy Chrisnandi mengatakan, pihaknya menyambut gembira dan sangat senang atas kunjungan Pimpinan DPR RI beserta Anggota Dewan ke Georgia. Saat dialog yang dengan Ketua Parlemen Georgia terungkap bahwa adanya harapan yang begitu besar dari Pemerintah Georgia, semakin meningkatnya hubungan antar parlemen, dimana Pimpinan Parlemen di Georgia juga memiliki kedudukan yang penting di dalam sistem Pemerintahan.

Di samping itu, tambah Yuddy, kerja sama yang lebih baik lagi juga terimplementasinya berbagai persetujuan-persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, khususnya perdagangan, kebudayaan diplomasi, dan lain sebagainya. Menurutnya, apa yang disampaikan Ketua Parlemen Georgia kepada Delegasi DPR RI kurang lebih sama yang dipesankan oleh Menteri Luar Negeri Georgia kepada Delegasi Indonesia yang datang.

“Artinya mereka benar-benar mengharapkan suatu kedekatan yang lebih intens dengan Indonesia dan mengharapkan kerja sama yang lebih erat di berbagai bidang. Dan hal-hal yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI dalam pertemuan, saya bisa merasakan mereka menyambut baik kehadiran kita, dan menyambut baik tawaran kerja sama kita. Mereka mengharapkan terimplementasinya berbagai gagasan-gagasan yang sudah kita kemukakan,” tegas Yuddy, yang turut mendampingi Delegasi DPR RI. ■ hr/sf

Dalam kesempatan tersebut, legislator PDI-Perjuangan itu mengatakan, Parlemen Georgia menawarkan kerja sama dibidang pendidikan, pariwisata dan olahraga, khususnya olahraga catur. Apalagi Batumi, Georgia, terbukti telah sukses menjadi tuan rumah bagi Olimpiade Catur ke-43 baru-baru ini. Bahkan Indonesia mengirimkan tim catur untuk bertanding pada pertandingan yang digelar pada 23 September - 6 Oktober 2018 itu.

Selama pertemuan, antar kedua parlemen itu juga membahas peran pemerintah serta kerja sama dan hubungan bilateral yang menekankan dalam bidang peningkatan hubungan



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Sofyan Efendi

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

**ANGGOTA REDAKSI**  
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske  
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmad Eko,  
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,  
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,  
Azka Restu Fadilah, Geraldio Opie

**ADMINISTRASI**  
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUANG TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



# DPR Jadi Rujukan Parlemen Malaysia

**DPR RI siap membuka pintu untuk berbagi pengalaman dengan Parlemen Malaysia yang ingin menjalankan reformasi parlemen di negaranya. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, DPR RI telah menjadi rujukan bagi berbagai negara dalam mewujudkan *check and balances* terhadap pemerintah. Kedatangan Parlemen Malaysia ke DPR RI salah satunya ingin mempelajari sistem Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan yang ada di DPR RI.**



Foto: Arief/hr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Parlemen Malaysia yang dipimpin Dato Mohamad Ariff MD Yusuf

“Mereka memandang sistem yang sudah dijalankan di DPR RI sangat baik dan bisa dijadikan rujukan di parlemen mereka. Saya juga sampaikan, sebetulnya tak perlu jauh-jauh datang ke DPR RI. Cukup instal aplikasi DPR Now! di *smartphone*, sudah bisa melihat berbagai kegiatan kedewanan maupun sidang di DPR RI,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Delegasi Parlemen Malaysia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (04/10).

Dalam kesempatan ini, Ketua DPR RI ditemani Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hasrul Azwar dan Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno. Delegasi parlemen Malaysia dipimpin Dato Mohamad Ariff MD Yusuf bertanya banyak hal tentang sistem dan tata kerja yang ada di DPR RI. Malaysia sendiri ingin mereformasi parlemennya dan mencari rujukan yang terbaik, salah satunya dengan mendatangi DPR RI untuk berbagi pengalaman dan informasi.

Bamsuet, sapaan akrab Ketua DPR RI menyampaikan harapannya agar

Parlemen Malaysia bisa mendorong pemerintahnya untuk mempercepat penyelesaian pembahasan *Memorandum of Understanding* (MoU) Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran antara Indonesia-Malaysia. Pembahasan MoU tersebut merupakan bagian dari berbagai pembahasan penting yang dibicarakan dalam kunjungan Perdana Menteri Mahatir Mohammad saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, 29 Juni 2018.

“Demi kebaikan dan persaudaraan kedua negara, MoU tersebut harus diselesaikan secepat mungkin. Karena sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia perlu terus mempertahankan hubungan bilateral yang selama ini telah berjalan baik. DPR RI juga mendukung upaya yang dilakukan pemerintah kedua negara dalam meningkatkan hubungan bilateral, termasuk penguatan kerja sama dalam kerangka diplomasi *parliament to parliament* dan *people to people*,” papar Bamsuet.

Legislator Partai Golkar ini ini memaparkan, sebagai negara yang hidup berdampingan, salah satu yang menjadi

perhatian Indonesia dan Malaysia adalah masalah perbatasan yang belum tuntas. Kedua negara perlu meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi mengenai perbatasan untuk menghindari perkembangan isu ke arah yang tidak diinginkan.

“Indonesia dan Malaysia telah sepakat melakukan survei dalam pengumpulan data dan penelitian untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Kami berharap parlemen kedua negara dapat mendorong masalah ini segera terselesaikan dan tidak ada pihak yang dirugikan,” harap legislator dapil Jawa Tengah VII ini.

Bamsuet berbagi pandangan bahwa Indonesia dan Malaysia punya tanggung jawab besar mewujudkan Asia Tenggara yang lebih sejahtera, aman, damai, dan stabil. Terlebih, sebagai sesama anggota *Inter Parliamentary Union* dan ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly*, parlemen Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang sama dalam menjaga perdamaian dunia dan stabilitas kerja sama regional ASEAN.

Bamsuet juga mengingatkan bahwa Indonesia dan Malaysia mengalami permasalahan yang sama dalam menghadapi kampanye hitam terhadap produk minyak sawit. Kedua negara merupakan produsen minyak kelapa sawit utama dunia dan telah membentuk Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit atau *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC).

“Kita perlu terus memberi dukungan kuat kepada pemerintah masing-masing agar selalu seiring sejalan dalam menghadapi berbagai isu internasional, terutama dalam menghadapi kampanye negatif produk minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) asal Asia oleh negara-negara Eropa. Dengan bekerja sama, kita dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik,” pungkas mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Delegasi Parlemen Malaysia yang hadir, antara lain Nga Kor Ming (Wakil Ketua), Hassan Abdul Karim (Anggota), Dato Sri, Dr. Haji Ismail Mohamed Said (Anggota), Zamshari Shaharan (Anggota), Datuk Roosme Hamzah (Sekretaris Parlemen), Dr. Muhammad Sayuti Hassan Yahya (Sekretaris Divisi Riset Parlemen), dan Abdijar Ab Rashid (Sekretaris Pertama Bidang Politik, Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia). ■ es/mh

# Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB

**Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.**



Foto: Geraldi/hr

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

**S**etidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu, verifikasi rumah, Surat Keputusan Kepala Daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (Risha, Kayu, Konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah Huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan

lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terang Fahri kepada awak media di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai hari ini belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi

baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai epicentrum gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

“Dana cash sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkask legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. **es/sf**

## Fadli Zon Diminta Pimpin HSBI



Foto: Geraldi/hr

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

**Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) meminta Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon untuk memimpin organisasi yang bergerak di bidang seni-budaya. Fadli pun menyatakan, dirinya merasa terhormat apabila didaulat menjadi Ketua Umum HSBI. Ia menganggap masih banyak senior-senior untuk memimpin bidang tersebut yang lebih memahami budaya Islam Indonesia dibanding dirinya.**

sempat saya sampaikan apabila ada orang lain yang lebih pantas, sebaiknya berikan saja kepada yang lain, yang lebih senior,” tuturnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (04/10).

Menurutnya, organisasi tersebut merupakan salah satu organisasi penting pada masanya yang telah menghimpun banyak orang-orang terkenal di bidang seni budaya Islam Indonesia. “Saya kira ini merupakan sebuah organisasi yang penting di masa lalu, dan mestinya juga menjadi organisasi yang bisa banyak berguna untuk menghimpun orang-orang yang memang aktif di bidang seni budaya Islam yang begitu kaya dari Aceh hingga Merauke,” ujarnya.

Namun, jika memang ini hasil

keputusan bersama, legislator Partai Gerindra itu mengaku siap mengemban amanah yang ditujukan kepadanya tersebut. Ia mengaku mengenal cukup banyak seniman dan budayawan Islam Indonesia dan juga akan mempelajari sistem struktur organisasi tersebut.

“Jika memang ini sebuah amanah, ya saya harus siap ya. Saya cukup banyak juga kenal dengan budayawan Islam Indonesia. Jadi, nanti saya bisa pelajari juga bagaimana mekanismenya, bagaimana membangun organisasinya, karena sebenarnya ini adalah organisasi yang penting namun sudah lama tertidur,” pungkasknya. ■ **eps/mh**

**H**al ini ia sampaikan sesaat setelah menerima audiensi dari perwakilan HSBI yang bertujuan menyampaikan permohonan secara khusus agar Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam ini mau menjadi Ketua Umum HSBI yang baru. “Saya merasa terhormat sekali. Tadi



# Pertanahan di Batam Rentan Konflik

Persoalan tanah di Kota Batam, Kepulauan Riau, sangat rentan konflik. Selain banyak otoritas yang mengatur Batam, juga banyak tanah yang beralih kepemilikan dan fungsi, sehingga banyak konflik. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron, perlu ada penertiban administrasi pertanahan untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Batam.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Kepri

“Akan banyak konflik tanah di Batam bila administrasi tidak dikelola dengan baik,” kata Herman saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Wakil Wali Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam, dan Kantor Pertanahan Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Kepri, Selasa (09/10).

Pengaturan tata ruang di Batam juga banyak menimbulkan konflik. Misalnya, kata legislator Partai Demokrat itu, alih fungsi lahan terutama kawasan hutan dan pertambangan. Di Pulau Rempang, Batam, dulu merupakan kawasan hutan konservasi. Lalu Menteri Kehutanan

Foto: Husien/hr

# Komisi II Gali Masalah Pelayanan Publik di Riau

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menggali masalah pelayanan publik serta mendalami isu maladministrasi di Provinsi Riau. Diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Ahmad Hajizi dan Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy, Tim Kunspek Komisi II DPR RI mendapat penjelasan mengenai kualitas pelayanan publik di Riau.

“Kami datang ke sini guna mendetailkan tentang permasalahan yang muncul di Riau. Kami bersyukur Ombudsman sudah memetakan dengan baik. Ada masalah pertanahan, pendidikan, maladministrasi serta masalah lain yang kami dalam apa tindaklanjutnya,” ungkap Mardani Ali Sera di Pekanbaru, Riau, Selasa (09/10).

Mardani pun memberikan apresiasi atas kerja Ombudsman Riau yang sudah secara baik menjalankan tugasnya, meski dengan jumlah pekerja yang hanya 15 orang. Meskipun tak sebanding antara jumlah pekerja dan tugas beratnya, Ombudsman telah mampu bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.

“Kami gembira dengan kinerja Ombudsman. Kami titipkan Pemprov Riau, agar Ombudsman bisa memiliki kantor yang lebih representatif untuk perwakilan Riau,” tutur legislator Partai



Suasana pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemprov Riau

Foto: Hendra/hr

minta diturunkan statusnya jadi areal penggunaan lain (APL). Bahkan, di kawasan hutan konservasi banyak patok dibangun oleh perusahaan-perusahaan.

Sementara Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad berharap, perlu ada kebijakan tertentu dari pemerintah pusat untuk mengurai persoalan pertanahan di Batam. Penyelesaian pertanahan harus segera diselesaikan. Yang juga kerap menjadi persoalan adalah ada dua otoritas yang memiliki kewenangan di Batam, yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.

“Ada dua tafsir tentang ini, Batam seperti kapal dengan dua nahkoda atau kapal dengan dua mesin. Bila ada dua nahkoda berarti ada rebutan arah ke mana kapal ini akan dibawa. Bila ada dua mesin berarti kapal ini bisa melaju dengan cepat. Sekarang tinggal bagaimana semua pihak melihat masalah ini,” kata Wakil Wali Kota Batam. ■ mh/sf

Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selain itu, Mardani juga menyoroti masalah rekrutmen CPNS di Riau. Ia mendapatkan keluhan terkait formasi dokter sub spesialis di Riau yang umur pendaftar dibatasi maksimal 35 tahun. Padahal untuk mencapai profesi itu dibutuhkan pendidikan selama 15 tahun. Menurutnya ini perlu ada pengecualian tentang syarat umur maksimal 35 tahun.

“Ada fakta menarik yang tidak masuk akal. Formasi dokter sub spesialis yang pendidikannya ditempuh selama 15 tahun, tapi pendaftaran CPNS dibatasi umurnya maksimal 35 tahun. Temuan ini akan kami bawa untuk dilakukan revisi khusus formasi super *skill person*. Harus ada *political will* dari pemerintah,” ujar legislator dapil Jawa Barat itu.

Khusus untuk persoalan seleksi CPNS ini, Komisi II DPR RI nantinya akan segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk menindaklanjuti temuan yang diperoleh. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan kualitas birokrasi yang lebih kredibel. Hal lain terkait pelayanan publik di Riau, Komisi II DPR RI akan terus mendukung perbaikan tata kelola birokrasi, sehingga menjadi lebih baik ke depannya. ■ hs/sf

## Komisi IV Segera Selesaikan RUU Kehutanan

**Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena menegaskan, pihaknya segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Kehutanan. Bahkan ditargetkan bisa rampung sebelum periode 2014-2019 berakhir. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka pembentukan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.**

“Ini kan sudah masuk Prolegnas 2015-2019, dan kita punya optimisme bahwa RUU ini bisa diselesaikan sebelum akhir masa jabatan 2014-2019. Ini adalah sebuah doa dan harapan kita bersama,” ungkap Michael saat menjaring pendapat dan masukan di Universitas Papua, Kota Manokwari, Papua Barat, Rabu (03/10).



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena

Foto: Eko/hr

Komisi IV DPR RI berpandangan, bahwa saat ini telah terjadi perkembangan permasalahan terkait tata kelola hutan, maka kebutuhan atas aturan perundang-undangan yang baru di tengah-tengah masyarakat sangat mendesak. Sedangkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah tidak bisa lagi menjawab kebutuhan saat ini.

Legislator Partai Demokrat ini pun menegaskan, bahwa perubahan atas undang-undang tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kontemporer tentang kehutanan.

“Kehadiran kami di Universitas Papua, Manokwari dalam rangka kunjungan kerja Rancangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terkait dengan Kehutanan. Undang-undang ini memang sudah tidak lagi relevan dan tidak kontekstual dalam menjawab dinamika kehutanan saat ini,” papar Anggota Dewan dari dapil Papua Barat ini.

Bagi Bangsa Indonesia, hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat. Namun ironisnya seiring dengan pesatnya pembangunan, kondisi hutan yang lestari cenderung menurun. Menyadari masalah tersebut, para pemangku kepentingan dibantu oleh masyarakat berkewajiban melakukan aktifitas pelestarian alam dan hutan agar ekosistem hayati dan nabati terus terjaga.

Alam harus dijaga daya dukungnya agar tetap lestari, dan diurus secara adil, arif, dan bijaksana. Selain itu pengelolaan hutan secara profesional, partisipatif, bertanggungjawab dan terbuka harus dilakukan oleh para aparat pemerintah. ■ eko/sf



# Komisi II Pantau Persiapan Pemilu di Jambi

**Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh memantau persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Provinsi Jambi. Penyelesaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan KTP-elektronik juga menjadi sorotan dalam Kunspek ini.**

“Ini merupakan kunjungan spesifik untuk mengetahui secara langsung mengenai penyelesaian DPT dan persiapan Pemilu 2019,” jelas Nini, sapaan akrab Nihayatul, saat pertemuan dengan Plt. Gubernur Jambi, perwakilan KPU, Bawaslu, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Jambi, Selasa (09/10).

Selain itu, kata Nini, pertemuan tersebut digelar juga untuk mengetahui penyelesaian program KTP-elektronik. Ia menegaskan, pada Pemilu 2019 semua masyarakat harus menggunakan KTP-el, dan tidak ada lagi menggunakan Surat Keterangan (Suket). Untuk itu, 7 persen perekaman KTP-el yang belum tuntas di Jambi harus segera diselesaikan.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh

Foto: Ria/hr

“Salah satu prasyarat Pemilu berkualitas adanya jaminan kepastian semua warga negara yang memenuhi

# RUU Kehutanan Perkuat Posisi Masyarakat Adat

**Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan pengelolaan hutan harus sejalan dengan konstitusi. Artinya, penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Namun, saat ini UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, serta tuntutan perkembangan zaman.**

“Masyarakat adat adalah bagian dari budaya yang harus kita akui keberadaannya. RUU ini akan memperkuat mereka, sebab mereka adalah bagian dari kearifan lokal. Ini yang harus kita hidupkan,” ungkap Edhy usai memimpin Focus Group Discussion pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU Kehutanan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (04/10).

Edhy menuturkan, UU Kehutanan dalam implementasi, banyak terjadi permasalahan seperti berkurangnya luas kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, hingga konflik dengan masyarakat adat. Menurutnya, mengelola hutan saat ini bukan hanya masalah hewan dan tanaman, tetapi juga bicara masalah kepentingan manusia yang tinggal di hutan. Karena itu, hadirnya RUU Kehutanan akan mengakui eksistensi hutan adat.

Dalam draf RUU Kehutanan sendiri telah dicantumkan perubahan status hutan menjadi hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. “Ada banyak masukan terkait ini. Secara prinsip kita tahu masalahnya, tapi siapa yang akan mulai. Sebenarnya jika PT-PT HTI (Hutan Tanaman Industri) itu niatnya ingin hidup berdampingan dengan masyarakat, maka masalah sosial tidak akan terjadi,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Fadholi menambahkan, RUU Kehutanan akan mensinkronkan antara aspek kelestarian dan pemanfaatan ekonomi dari wilayah hutan. Menurutnya, pengelolaan hutan perlu dilakukan dengan asas manfaat, lestari, kerakyatan, dan keadilan. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

“Perlu ada satu perlindungan dengan baik dan juga perlu diatur agar hutan bisa dimanfaatkan masyarakat secara luas. Maka RUU ini kita harapkan bisa mengatur kepentingan-kepentingan pemanfaatan hutan sehingga betul-betul bisa digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Jangan sampai kemudian hutan ini dikuasai dan diperuntukkan hanya untuk akses



Foto: Anne/hr

Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo



syarat bisa menggunakan hak pilihnya. Tidak boleh ada satu pun warga negara yang secara umum hilang hak pilihnya hanya karena negara gagal memfasilitasinya,” kata legislator PKB itu seraya mengimbau masyarakat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi.

Turut hadir dalam Kunspek ini Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji (F-PDI Perjuangan), Endro Suswantoro Yahman (F-PDI Perjuangan), Hasbi Asyidiki Jayabaya (F-PDI Perjuangan), Dadang S. Muchtar (F-Golkar), Melda Addriani (F-Golkar), Abdul Hakam Naja (F-PAN), Yanuar Prigatin (F-PKB), Sutriyono (F-PKS), Andi Mariat (F-PPP), Tamanuri (F-Nasdem) dan Rufinus Hotmaulana Hutaauruk (F-Hanura).

■ rnm/sf

perusahaan-perusahaan,” papar legislator F-NasDem ini.

Ia menambahkan, penataan masyarakat adat akan menjadi salah satu skala prioritas dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini. “Pemukiman dan perkebunan adat akan diatur, apalagi perusahaan yang mengelola hutan dan belum mendapatkan izin secara resmi. Masyarakat adat termasuk masyarakat di wilayah pinggiran hutan harus mendapatkan perlindungan dan pemanfaatan hutan dengan maksimal,” imbuhnya. ■ ann/mh



abowo berfoto bersama peserta FGD RUU Kehutanan di Sumsel

# UU Kehutanan Perlu Direvisi

**Komisi IV DPR RI mengunjungi Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menjangkau masukan terkait pengelolaan sumber daya hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini perlu dilakukan karena undang-undang hutan yang ada dinilai belum mampu memperbaiki kondisi hutan Indonesia yang saat ini masih memprihatinkan.**

“Kondisi hutan Indonesia darurat luar biasa untuk perbaikan. Sayangnya, UU Kehutanan belum bisa memperbaiki berbagai persoalan yang ada, sehingga perlu penggantian undang-undang, bukan hanya perubahan pasal per pasal,” kata Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Fakultas Kehutanan UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (03/10).

Laju deforestasi kawasan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hutan Indonesia semakin menyempit akibat pembukaan atau konversi lahan. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, yaitu dua juta hektar per tahun. Oleh sebab itu, Urip memandang perlu perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan. Undang-undang yang telah ada dinilai mereduksi konsep ekosistem hutan dalam fungsi-fungsi terpisah.

**Deforestasi kawasan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hutan Indonesia semakin menyempit akibat pembukaan atau konversi lahan**

Praktik pengelolaan hutan saat ini bersifat eksploitatif dan hanya bertumpu pada korporasi. Sementara masyarakat kurang diberi akses. Seyogianya, ke depan pengelolaan hutan dilaksanakan berbasis ekosistem yang memfungsikan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.



Foto: Andri/hr

Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip

Urip memaparkan, terdapat beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam undang-undang kehutanan, antara lain menjadikan hutan sebagai salah satu cara mitigasi bencana, perubahan rezim pengelolaan hutan, penguatan daya saing, serta memperkuat komoditas di pasar global.

Legislator dapil Bali ini mengatakan, UU Kehutanan dalam perjalanannya telah melalui berbagai dinamika. Banyak permasalahan terkait pengurusan hutan, seperti alih fungsi, penguatan, perambahan, perusakan, kebakaran, serta konflik dengan masyarakat adat. Politisi PDI-Perjuangan ini, menyambut baik masukan dan usulan dari akademisi UGM. Pihaknya sangat terbuka untuk menampung segala saran dan gagasan dari berbagai pihak, termasuk UGM.

“Harapannya ada masukan dan pemikiran dari UGM atas konsepsi RUU yang disusun. Kami terbuka lebar menerima masukan dan memperbanyak diskusi untuk mencapai titik temu dalam penyusunan UU Kehutanan,” harapnya. ■ man/mh





Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu meninjau Unit Bisnis Pertambangan Nikel PT. ANTAM di Kolaka, Sultra



# Tak Bangun Smelter, Izin Ekspor Tambang Dicabut

**Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah bersikap tegas kepada perusahaan-perusahaan tambang yang tak merealisasikan pembangunan smelter hingga tahun 2022. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu berharap, relaksasi dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan regulasi perpanjangan kewajiban pembangunan smelter hingga tahun 2022, adalah yang terakhir kali diberikan.**

**D**emikian diungkapkan Gus Irawan saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Aneka Tambang Tbk, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Direktur PSLB3 Kementerian LHK RI di Kantor PT. ANTAM Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (04/10).

“Kita berharap relaksasi pemerintah melalui PP Nomor 1 Tahun 2017 adalah untuk yang terakhir kali. Kita ingin pastikan perusahaan pertambangan yang mendapatkan izin ekspor, tapi belum juga membangun smelter, akan kita rekomendasikan kepada pemerintah untuk mencabut saja izin ekspornya, supaya ada efek jera,” tegas Gus Irawan.

Ia menambahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba semangatnya adalah hilirisasi, pemurnian mineral dalam negeri, sehingga ada nilai tambah (added value) yang dinikmati di dalam negeri. UU itu memberikan waktu transisi 5 tahun sejak 2009-2014, namun ternyata belum juga selesai.

Kemudian diberikan lagi waktu kepada perusahaan pertambangan dengan PP Nomor 1 Tahun 2014 dengan tenggat waktu 3 tahun sampai 2017, namun smelter masih juga belum selesai. Hingga terakhir keluar PP Nomor 1 Tahun 2017 yang memberikan waktu lagi untuk pembangunan smelter selama 5 tahun hingga tahun 2022.

“Negara ini sudah terlalu baik, maka itu Komisi VII DPR ingin memastikan bahwa tahun 2022 itu menjadi yang

terakhir batas relaksasi dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba,” legislator Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini mendorong perusahaan-perusahaan tambang yang belum memiliki smelter agar datang ke PT. ANTAM untuk melihat dan belajar bagaimana membangun smelter.

“PT. ANTAM ini merupakan pionir smelter di Indonesia sebelum lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009, mereka sudah melakukan proses pemurnian (smelter). Melalui kunjungan ini kita ingin meyakinkan PT. ANTAM supaya terus bisa mengembangkan diri. Bahwa ada yang masih dalam proses pembangunan, kita berharap itu segera bisa diselesaikan,” ulasnya.

Banyak perusahaan lain yang memperoleh izin ekspor sekitar 2-2,5 juta ton, namun realisasi pembangunan smelter masih jauh dari harapan. Apalagi mereka yang belum ada kemajuan fisik terkait janji kewajiban membangun smelter, Komisi VII DPR RI akan merekomendasikan untuk dicabut izin ekspornya.

Ia juga mendorong proses hilirisasi pertambangan sesuai semangat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba bisa segera mulai direncanakan dengan sungguh-sungguh.

Di lain pihak, Direktur Operasional PT. ANTAM Tbk Hari Widjajanto menjelaskan terkait ijin ekspor 2,7 juta ton, pihaknya sudah mulai merealisasikan hingga September 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton.

“Kami yakin akan mampu mencapai target dan merealisasikannya, bahkan jika ditambah izin kuota ekspornya,” ungkapnya optimis. ■ oji/sf



Foto: Oji/hr





Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau Kawasan Wisata Geoheritage Wonocolo

Foto: Runt/hr

## Geoheritage Wonocolo Berpotensi Tingkatkan *Lifting* Minyak Nasional

**Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan bahwa Kawasan Wisata Geoheritage Wonocolo atau sumur minyak yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat lokal berpotensi meningkatkan jumlah *lifting* minyak secara nasional.**

**D**emikian diungkapkannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke kawasan Geoheritage Teksas Wonocolo, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (05/10). Turut mendampingi Direktur Hulu Pertamina GM Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, SKK Migas, Forpimca Kedewan dan tokoh masyarakat setempat.

“Kawasan wisata ini memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah *lifting* minyak secara nasional. Dengan catatan, pemilik wilayah operasi yaitu Pertamina EP Asset 4 Field Cepu bisa mengelola dengan baik keterlibatan masyarakat setempat

sebagai penambang,” ujar Ridwan.

Lebih lanjut legislator Partai Golkar itu menuturkan Pertamina EP & SKK Migas sebaiknya mengutamakan konsep pengelolaan sumur tua dengan melibatkan masyarakat melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pertamina harus mengerti, izinnya harus diberikan kepada masyarakat jika letak sumur di lahan rakyat. Sedangkan diberikan kepada BUMD jika sumur minyaknya memakai tanah kas desa atau tanah perhutani,” paparnya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua yang bisa dikelola oleh KUD maupun BUMD. Ia juga mengusulkan ada pembagian secara adil (*fifty-fifty*) jumlah sumur yang dikelola BUMD dan KUD.

“Jadi saya kira di Bojonegoro ini ada kurang lebih lima ratus sumur tua, dan empat ratus sembilan puluh kurang lebih diberikan izin pengelolaannya kepada pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sedangkan Koperasi Unit Desa (KUD) hanya diberikan lima izin pengelolaan sumur. Nah, menurut saya, ini merupakan ketidakadilan kepada masyarakat sehingga bisa menyebabkan kemarahan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya pembagian pengelolaan sumur tua antara BUMD dan KUD ini salah satunya untuk menghilangkan *illegal drilling* dan mampu mendorong peningkatan jumlah *lifting* minyak.



# PT. Semen Tonasa dan Bosowa Didorong Capai *Proper* Hijau

“Saya mengharapkan dengan pembagian yang seimbang pengelolaan sumur tua antara BUMD dan KUD bisa menurunkan ilegal drilling lebih lanjut paling utama bisa meningkatkan jumlah *lifting* minyak,” kata legislator dapil Jawa Timur itu.

Dari hasil pemaparan dalam kunjungan tersebut, diketahui saat ini jumlah *lifting* minyak yang diproduksi mengalami peningkatan 300 barel per hari, yakni dari 100 barel menjadi 400 barel per hari. Bahkan potensi tersebut bisa mencapai 900 barel apabila dikelola dengan maksimal.

Ridwan menambahkan, apa yang telah dilakukan Pertamina EP Asset-4 akan menjadi sebuah contoh konsep pengelolaan sumur tua yang baik, dimana masyarakat lokal mendapatkan peran aktif untuk mengelola sumur tua dan lingkungannya. Ia pun menargetkan, target *lifting* tahun 2018 harus meningkat menjadi 775 ribu barel perhari secara nasional dari sebelumnya 750 ribu barel perhari.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengatakan KUD dan BUMD harus saling bersinergi untuk meningkatkan *lifting* minyak. Ia juga mengajak semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan Sumur Tua Wonocolo untuk mengedepankan dialog dan kerja sama dalam segala hal. “Saya yakin dan akan terus mendorong agar KUD dan BUMD bisa meningkatkan *lifting* minyak,” dorong legislator Partai Golkar itu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Hulu Pertamina Persero Darmawan Syamsu mengatakan antara pihak KUD dan BUMD harus ada kerja sama yang baik antara kedua belah pihak. “Komunikasi yang terpenting karena dengan komunikasi yang baik bisa bekerja dengan baik, tadi saya dengar ini hanya kurang komunikasi saja, dan jika berbicara soal peraturan atau ijin yang jelas, menurut saya sudah sangat jelas,” tuturnya.

Menurut Syamsu, KUD dan BUMD dapat mengajukan pengoperasian lapangan kemudian mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan izin dari Gubernur. Setelah itu akan di-*review* oleh Pertamina dan lokasinya akan diberikan kepada Pertamina EP sebagai penanggung jawab. ■ rni/ann/sf

**Wakil Ketua VII DPR RI Tamsil Linrung menilai, progres dan kegiatan yang dilakukan PT. Semen Tonasa dan PT. Semen Bosowa telah sejalan dengan apa yang menjadi konsen Komisi VII DPR RI. Keinginan supaya *proper* yang dari level biru ke hijau telah disampaikan Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan persyaratan tertentu hendaknya segera dipenuhi.**



Suasana pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. Semen Tonasa dan Direksi PT. Semen Bosowa

Foto: Mastur/hr

“Komisi VII tentu mendukung perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan, perusahaan Ber*proper* hijau,” katanya usai memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan direksi dan jajaran kedua perusahaan tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (04/10).

Tamsil menekankan bahwa tugas perusahaan bukan hanya mengejar aspek finansial, tetapi juga harus menjaga lingkungan. Salah satu diantaranya adalah kawasan karst dimana UNESCO merekomendasikan untuk menjadi kawasan warisan dunia. “Ini adalah satu yang harus dijaga,” tambah legislator PKS itu.

Anggota Tim Kunspek Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris juga menyampaikan sikap yang sama, agar kedua perusahaan semen yang lama beroperasi dan mensuplai semen ke Indonesia Timur

diharapkan *proper*-nya ke level hijau. Untuk itu ke depan, syarat-syarat seperti pemberdayaan masyarakat, inovasi dalam pengelolaan limbah, dan pengelolaan pengaduan masyarakat harus bisa diselesaikan, sehingga tidak ada keluhan lagi.

“Kita harapkan program CSR atau pemberdayaan masyarakat harus berinovasi. Jika program CSR di ring I sudah terpenuhi, maka kita harapkan masuk ke ring II,” tegas legislator Partai Amanat Nasional (PAN) dan daerah pemilihan (dapil) Sulsel ini.

Terkait program CSR ini, Tamsil menilai yang dilakukan Semen Tonasa bisa menjadi contoh oleh perusahaan lainnya. Dalam membantu UMKM telah berkembang dan terlihat hasilnya dengan menerapkan dana bergulir. “Ini contoh pembinaan kepada UMKM menjadi sehat tapi perlu ditingkatkan dan diperluas,” pungkas legislator dapil Sulsel ini. ■ mp/mh

# Panja SBSN Gali Informasi Penggunaan Dana di Sumut

**Guna memperoleh informasi dan untuk memetakan berbagai hambatan dalam masalah penggunaan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Kementerian Agama RI, Panja SBSN Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka memperoleh solusi yang tepat dan sesuai dengan permasalahan SBSN.**

“ Kita ingin melihat apakah anggaran APBN yang bersumber dari SBSN menjadi persoalan atau tidak, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Begitu pula dengan keberadaannya, apakah masih dibutuhkan atau tidak,” ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Medan, Sumut, Kamis (04/10).

Selain itu, lanjutnya, Panja SBSN juga ingin memperoleh masukan tentang kebijakan dalam melakukan perbaikan mengenai perencanaan, penganggaran, dan penggunaan dana SBSN. Seperti diketahui, permasalahan SBSN itu sendiri telah diatur pengertian dan mekanismenya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.

“SBSN atau disebut juga Sukuk Negara, berdasarkan Pasal 1 UU tersebut adalah



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI melihat maket gedung baru UIN Sumut

surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing,” jelas Marwan.

Legislator PKB itu juga menyampaikan bahwa terdapat perusahaan penerbit SBSN yang kegiatannya melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN.

Sementara itu, dalam masing-masing paparannya, semua mitra kerja Komisi

VIII di daerah Provinsi Sumut yang hadir dalam pertemuan di Kampus UIN Medan itu, meminta agar keberadaan dana pembiayaan yang bersumber dari SBSN tidak dihapuskan. Mereka semua mengaku merasa terbantuan dengan adanya dana SBSN itu.

Tim Kunspek Panja SBSN Komisi VIII DPR RI juga berkesempatan meninjau salah satu proyek pembangunan yang sedang dikerjakan di wilayah lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Medan. ■ dep/mh

## Konsil Kebidanan Harus Masuk RUU Kebidanan

**Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI mendapat aspirasi dari para bidan dan tenaga medis di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, agar konsil (dewan) kebidanan dimasukkan dalam RUU Kebidanan yang kini tengah dibahas Panja RUU Kebidanan Komisi IX DPR RI.**

“ Sebenarnya kami sudah melakukan pembahasan sekitar 300 dari 600-an DIM yang ada. Namun masih ada beberapa DIM yang

masih belum ditemukan titik temu. Salah satunya terkait pembentukan konsil,” ujar Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf usai pertemuan dengan perwakilan beberapa

organisasi tenaga medis di Surakarta, Jateng, Kamis (04/10).

Dijelaskan Dede, konsil kebidanan sangat penting, selain untuk memberikan perlindungan kepada bidan, juga sebagai pengawas para bidan dalam menjalankan tugasnya secara kompeten dan profesional. Hal itu berbanding terbalik dengan penilaian pemerintah

**Pemerintah menganggap konsil kebidanan dapat digabungkan dengan konsil tenaga medis lainnya seperti konsil perawat atau lainnya**





# Kemenkes Diminta Tanggap Kondisi Pasca Gempa Sulteng

**Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengatakan bahwa dirinya turut berbelas sungkawa dan prihatin yang sedalam-dalamnya atas musibah gempa bumi dan tsunami yang menimpa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, baru-baru ini. Untuk itu, ia meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk tanggap dan cepat menangani seluruh korban.**



Foto: Chasbi/hr

Tim Kunspek Komisi IX DPR RI memantau korban gempa Palu di RS DR. Wahidin Makassar

“Ternyata keluarga kita yang di Palu yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami itu memang masih banyak membutuhkan pelayanan kesehatan yang sangat tepat dan cepat. Kita lihat di Rumah Sakit DR. Wahidin, banyak korban yang dirujuk ke Makassar, karena dianggap

rumah sakit tersebut adalah rumah sakit rujukan dari Indonesia Timur,” kata Ichi, sapaan akrabnya, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (04/10).

Ia melanjutkan, keluhan dari kepala rumah sakit adalah tenaga perawat yang

kurang dan juga ada beberapa bahan habis-pakai yang sangat dibutuhkan segera. Sedangkan untuk kebutuhan dokter sudah tercukupi. “Saya berharap kekurangan-kekurangan ini segera dipenuhi, sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terkena gempa dan tsunami ini tidak terhambat. Sebaliknya, harus segera mendapat pelayanan yang tepat dan cepat,” jelasnya.

Komisi IX DPR RI berharap Kemenkes dapat bertindak dengan cepat menyelesaikan permasalahan ini. “Saya pasti akan mendorong dan mengusulkan kepada Pimpinan Komisi IX DPR untuk segera melakukan kunjungan kerja ke Palu untuk melihat pelayanan kesehatan di sana, karena kita tahu banyak sekali masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan medis. Kita juga tahu keadaan di sana sangat memprihatinkan, seperti rumah sakit yang sudah runtuh, banyak tenaga kesehatan yang hilang, dan tentu alat-alat kesehatan juga rusak,” ungkapnya.

Legislator Partai Golkar ini mendorong Komisi IX DPR RI perlu meninjau langsung ke lokasi bencana gempa di Palu untuk melihat dari dekat para korban gempa dan kerusakan yang terjadi. Ia mengungkap informasi dari beberapa politisi yang sudah mengunjungi Palu, ternyata kondisinya cukup mencekam. Bahkan, orang yang kelaparan bisa menjadi ganas.

“Kita tidak bisa menyalahkan hal ini, karena ini perlu penanganan yang intensif, agar segala bantuan segera masuk, peralatan-peralatan medis juga bisa segera masuk, dan mungkin harus ada rumah sakit darurat yang bisa dikirim agar tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar,” tutup legislator dapil Sulsel itu. ■ cas/mh



Foto: Ayu/hr

Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf bersama Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo

yang malah menganggap tidak penting pembentukan konsil. Pemerintah menganggap konsil kebidanan dapat digabungkan dengan konsil tenaga medis lainnya seperti konsil perawat atau lainnya.

Namun, perwakilan beberapa organisasi bidan, seperti bidan Delima dan sebagainya berharap agar RUU Kebidanan yang tengah dibahas DPR RI dan pemerintah memasukkan konsil dalam RUU tersebut kelak. Pasalnya, konsil yang didalamnya termasuk Mahkamah Kehormatan atau Mahkamah Etik itu akan menjadi pengawas dan acuan bagi mereka dalam menjalankan tugas-tugas kebidanan. ■ ayu/mh





Tim Kunspek Komisi X DPR RI bertukar cenderamata dengan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda DI Yogyakarta

Foto: Sofyan/hr

## RUU Ekonomi Kreatif Pastikan Bahas Permodalan dan Pembinaan

**Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif yang saat ini sedang disusun oleh Komisi X DPR RI dipastikan akan membahas permodalan dan pembinaan kepada pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya payung hukum RUU Ekonomi Kreatif ini, diharapkan pemerintah memberikan perhatian kepada pelaku ekonomi kreatif berupa permodalan dan pembinaan, sehingga sektor ekonomi kreatif dapat menggeliat dan berkembang.**

“Ekonomi kreatif itu bisa maju kalau pemerintah ikut memberikan fasilitas tentang permodalan. Buatlah skema permodalan yang memudahkan bagi pelaku ekonomi kreatif, misalnya tidak perlu agunan atau bunga rendah,” kata Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR

RI dengan akademisi, pelaku ekonomi kreatif dan stakeholder terkait di Kantor Gubernur Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Kamis (04/10). Kunspek ini dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan guna memperkuat pembahasan RUU Ekonomi Kreatif.

Djoko menambahkan, guna semakin mendukung para pelaku ekonomi kreatif,

pemerintah bisa menerapkan kebijakan untuk tidak memungut pajak, khususnya kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia optimis jika permodalan ini bisa diatur dalam RUU Ekonomi Kreatif, maka sektor ekonomi kreatif ini akan menggeliat. Termasuk pemerintah juga berperan untuk meng-take out (mengambil, RED) seluruh produksi dari pelaku ekonomi kreatif lokal, untuk kemudian dipasarkan, bahkan diekspor.

“Atas dasar itu, Badan Ekonomi kreatif (Bekraf) harus selalu memberikan pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif, supaya menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas. Jangan sampai kita memproduksi produk, tampilannya sudah bagus, misalnya bahan dari kayu atau bambu, kemudian diekspor ke luar



negeri. Namun karena iklim berbeda, kemudian rusak. Itu kita benahi dulu,” jelas legislator Partai Demokrat itu.

Terkait pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif ini, Djoko memastikan hal itu masuk pembahasan di poin pembinaan pada RUU Ekonomi Kreatif. “Sektor ekonomi kreatif kalau tidak dibantu, tidak akan mungkin bergerak maju. Pemerintah harus memfasilitasi permodalan, pemasaran, pembinaan dan pelatihan mengenai kualitas. Nah kalau itu bisa, saya yakin bisa menjadi penggerak ekonomi kecil. Pedesaan pasti akan menggeliat,” optimis Djoko.

Legislator dapil Jawa Tengah itu menambahkan, RUU Ekonomi Kreatif bukan untuk membatasi kreativitas para pelaku ekonomi kreatif, tapi justru mengembangkan kreativitas yang bisa meningkatkan added value. “Saya sepakat dengan Kepala Bekraf, potensi ekonomi kreatif ini sangat besar, bahkan sampai Rp 250-300 triliun. Kalau ini bisa dikembangkan lagi, ini bisa menjadi meng-generate perekonomian,” imbuh Djoko.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Titik Prasetyowati Verdi (F-NasDem) mengatakan, RUU Ekonomi Kreatif ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah, bank, ataupun lembaga pembiayaan untuk mengucurkan permodalan kepada pelaku ekonomi kreatif. Ia mencontohkan, peran ekonomi kreatif pada Asian Games 2018. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif turut berperan pada kemeriahan dan kesuksesan gelaran olahraga se-Asia pada 18 Agustus-2 September 2018 lalu.

“Pembiayaan ini akan diatur, karena ini prinsip mendasar. Misalnya dari pemerintah, bank, atau lembaga keuangan, harus punya payung hukum yang jelas. Jika sudah ada payung hukumnya, pasti mereka tidak akan ragu. Termasuk pembinaan. Jika Bekraf sudah memiliki payung hukum, maka akan semakin memudahkan dalam memberikan pembinaan dan pelatihan,” tandas legislator dapil Jawa Timur itu.

Selain menyerap aspirasi terkait RUU Ekonomi Kreatif, Tim Kunspek juga bertandang ke Rumah Kreatif Yogyakarta (RKJ), di Sagan, Gondokusuman, Yogyakarta. Dalam peninjauan di RKJ yang merupakan binaan Kementerian BUMN ini, Tim Kunspek diperlihatkan berbagai kreasi pelaku ekonomi kreatif di Yogyakarta. Seluruh Anggota Tim Kunspek mengapresiasi kehadiran RKJ dalam membina dan memasarkan kreasi pelaku ekonomi kreatif. ■ sf



Foto: Jayadi/hr

Tim Kunspek Komisi X DPR RI mengunjungi Rumah Kreatif BUMN di Batam

## Bekraf Bangun Rumah Kreatif untuk UKM

**Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengapresiasi adanya Rumah Kreatif BUMN yang dibentuk oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Bekraf sadar, banyak masalah dari hulu ke hilir yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Untuk itu, Bekraf menggandeng BUMN sebagai pendukung kegiatan UKM di daerah. Semua BUMN yang ada di pelosok-pelosok daerah dilibatkan untuk lebih peduli dalam mengembangkan UKM sekaligus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.**

“ Saya mengucapkan selamat dan terus semangat kepada teman-teman yang mengelola rumah kreatif BUMN Batam yang kebetulan diberikan pada PT. Telkom. Saya kira ini langkah yang baik bagaimana melakukan bimbingan dan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya,” ujar Reni saat mengunjungi Rumah Kreatif BUMN PT. Telkom Batam, Kepulauan Riau, Kamis (05/10), sebagai rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kepri.

Materi yang diberikan kepada pelaku UKM pun cukup banyak mulai dari cara membuat *brand* produk, bagaimana permodalannya, pemasarannya, dan bagaimana menjadi pengusaha di bidang online (e-commers). Setelah semua itu berjalan, mereka juga akan diajarkan bagaimana mematenkan produk.

“Mematenkan produk ini menjadi penting karena dapat melindungi produk, meningkatkan nilai jual, dan yang terakhir tentu untuk menghindari pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutur legislator dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Dengan hadirnya Rumah Kreatif BUMN di Batam ini, jadi contoh bagaimana Bekraf memfasilitasi dan mengembangkan usaha para pelaku UKM yang ada di daerah. Selain itu, Bekraf juga harus terus melakukan inovasi agar banyak progres yang dihasilkan. “Saya harap Bekraf lebih agresif lagi dalam merespon berbagai hal yang sudah dijalankan maupun yang belum dijalankan oleh Rumah Kreatif BUMN,” tutup legislator dapil Jawa Barat itu. ■ jay/mh

# Tingkat Inflasi Banten Cenderung Meningkatkan

**Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia Provinsi Banten menyebutkan, tingkat inflasi Banten pada Triwulan IV tahun 2018 diproyeksikan pada kisaran 3,47-4,2 persen, atau meningkat dibandingkan perkiraan pada Triwulan III Tahun 2018 sebesar 3,5-4,0 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Banten pada Triwulan IV tahun 2018 diprediksi tumbuh lebih tinggi dibandingkan pada triwulan sebelumnya.**

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI saat pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Perwakilan BI Banten dan Badan Pusat Statistik (BPS), di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (05/10).

“Kota Tangerang menjadi salah satu pembentuk inflasi terbesar di Banten dengan jumlah presentase sebesar 70 persen. Tingginya tarif pembiayaan pelajaran yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan baik berbentuk kursus maupun universitas, dan juga tingginya tingkat konsumsi-konsumsi rutin yang sifatnya konsumtif di Tangerang menjadi sejumlah faktor meningkatnya inflasi,” jelas Marwan.

Legislator Partai Demokrat itu mengingatkan penting untuk menempatkan tingkat inflasi pada level terjaga. Hal ini untuk mendukung perkembangan ekonomi di daerah yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

“Jika inflasi ringan, maka akan memiliki pengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yakni meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi,” ujar Marwan.

Namun sebaliknya, Marwan menyebutkan jika inflasi tinggi, maka masyarakat akan menjadi tidak bersemangat dalam bekerja, menabung



Foto: Tiara/hr

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan

atau menjalankan investasi, dan melakukan produksi, karena harga-harga meningkat dengan cepat. “Untuk itu, Pemprov Banten perlu memberikan solusi-solusi terbaik untuk menekan meningkatnya inflasi,” imbuhnya.

Di sisi lain, legislator daerah pemilihan (dakil) Lampung itu turut menyoroti tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten yang diakibatkan oleh perpindahan beberapa pabrik ke wilayah lain, akibat tingginya biaya logistik dan ketidak lancaran konektivitas pengiriman logistik.

“Ke depan saya berharap adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga nantinya tercipta kelancaran arus *supply* dan membuat perusahaan atau investor tertarik kembali untuk membangun pabriknya di provinsi Banten,” harapnya.

Menanggapi data bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu kontribusi jumlah pengangguran terbanyak di Banten, Marwan mengimbau, pentingnya peningkatan kerja sama melalui program

magang antara 600 SMK di Banten dengan 212 Industri yang ada di Banten.

“Program magang diharapkan menjadi salah satu peluang untuk memberikan kepastian pada siswa-siswi lulusan SMK untuk bekerja. Dengan adanya pengalaman magang pada suatu perusahaan, nantinya industri-industri di Banten akan memprioritaskan merekrut masyarakat Banten sebelum mengambil tenaga kerja dari daerah lain,” imbuh Marwan.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI provinsi Banten Rahmat Hernowo menyebutkan, tiga kota penyumbang inflasi tertinggi di Provinsi Banten yakni, Kota Tangerang sebesar 3,55 persen, Kota Serang 3,47 persen dan Kota Cilegon 2,6 persen.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi kami perkiraan di tahun 2018 ada di angka 5,5-5,9 persen. Sementara proyeksi inflasi berada di angka 3,7-4,1 persen, untuk inflasi masih berada di target 3,5 plus minus 1 dan kami perkiraan ini akan mendekati angka 4 persen,” jelasnya. ■

tra/sf



# Komisi X Serap Masukan RUU Ekonomi Kreatif

Komisi X DPR RI berkomitmen menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif agar bisa segera mendapat perlindungan kepada sektor ekonomi kreatif, khususnya pada Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku ekonomi kreatif, pembiayaan, dan hak kekayaan intelektual. Untuk memperkaya pembahasan RUU Ekonomi Kreatif, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI menyerap masukan ke Provinsi Bali.



Tim Kunspek Komisi X DPR RI mengunjungi industri ekonomi kreatif di Bali

Foto: Azka/hr

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan bahwa banyak masukan yang disampaikan para akademisi di Bali, terutama dari Universitas Udayana (UNUD) dan Institut Seni Indonesia (ISI). Masukan juga disampaikan dari para pelaku ekonomi kreatif dan dinas-dinas. Ekonomi kreatif di Bali tersebar di beberapa tempat, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pariwisata. Diusulkan agar semua disatukan dalam satu wadah.

“Nah, ini masukkan. Kalau diformalkan dalam rancangan undang-undang, bagaimana nanti kelembagaannya. Masalah ekonomi kreatif ini dilakukan oleh satu kementerian tersendiri. Ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintahan daerah. Kita sinkronkan RUU ekonomi kreatif ini dengan undang-undang tersebut,” ungkap Fikri usai pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran, di Kantor Gubernur Bali, Kamis (04/10).

Pertemuan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha, beberapa Universitas di Bali, LSM, dan dinas terkait di Kantor Gubernur Bali. Fikri menuturkan bahwa ada beberapa hal yang bisa direkomendasi dan tidak. Tetapi sebagian besar menyoroti tentang kelembagaan. Menyinggung hak intelektual, kendalanya soal kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya ada. Biasanya menciptakan karya seni hanya untuk seni, bukan untuk bisnis yang bermotif ekonomi.

Legislator PKS ini menambahkan bahwa di Bali ada badan film bernama

Badan Film Daerah (BAFIDA). Ini juga harus disesuaikan dengan hak kekayaan intelektual. Pemerintah harus mengadvokasi dan melindungi para pelaku ekonomi kreatif. “Pemerintah sekarang baru sadar bahwa persentase pendidikan vokasi harus naik. Kalau dulu 70 persen akademik, 30 persen advokasi. Sekarang 70 persen advokasi dan 30 persen akademik,” jelasnya.

Ditambahkannya, pembentukan SDM dan pembinaan SDM ekonomi kreatif juga jadi perhatian. Revitalisasi pendidikan dan advokasi juga harus diwujudkan. Fikri mengatakan mainset ekonomi kreatif itu masih di hilir. Harusnya mainsetnya ke hulu, “Dalam RUU Ekonomi Kreatif sudah dimasukkan bagaimana mengubah mainset. Saya kira eksekutif maupun legislatif harus mengubah mindset tadi,” tutup legislator. ■ azk/mh



Tim Kunspek Komisi XI DPR RI meninjau fasilitas kapal patroli Bea dan Cukai Batam

Foto: Jaka/hr

## Kapasitas Kapal Patroli Bea Cukai Batam Perlu Ditingkatkan

**Kapal para penyelundup dinilai memiliki *power* dan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan kapal patroli milik Bea dan Cukai Tipe B Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, perlu segera ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya, agar bisa mengamankan perairan wilayah Indonesia, khususnya Kepri, dari kejahatan. Apalagi letak Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.**

“Kita sering mendengar beberapa penyelundupan terjadi di Batam, berupa komoditas yang melanggar bea dan cukai kita. Kita sudah menyaksikan sendiri memang kapal-kapal kita perlu ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI menumpang kapal patroli Bea dan Cukai Batam meninjau batas perairan laut di Batam, Kepri, Jumat (05/10).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, koordinasi antar lembaga dalam mengamankan perairan perlu ditingkatkan, seperti di wilayah-wilayah negara tetangga Indonesia. “Walaupun koordinasi kita sudah ada, tetapi fasilitas dan infrastruktur perlu diperkuat ke depannya, sehingga kita bisa saling bekerjasama mengamankan dari pihak-pihak yg ingin melakukan tindak kejahatan di wilayah kita,” tandas legislator dapil Sumsel itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Saiful Rasyid, ia mendorong perlunya penambahan kapal patroli yang memiliki kekuatan dan kecepatan lebih. Pasalnya, sindikat penyelundupan barang di Batam menggunakan kapal besar pada awalnya, namun di tengah laut barang-barang itu dibongkar dan dimasukkan ke kapal-kapal kecil yang memiliki kecepatan.

“Strategi mereka ini sungguh sangat menyulitkan petugas patroli kita. Mereka membongkar barang di tengah laut atau wilayah internasional, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, di sini juga banyak pelabuhan-pelabuhan kecil, jadi mereka mudah lolos dari pantauan patroli,” ungkap legislator Partai Gerindra itu.

Saiful meyakini, Bea dan Cukai Batam memiliki kesungguhan untuk mengatasi masalah ini. Tinggal bagaimana mereka bekerja sama dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Indonesia dan perlunya ada koordinasi ke pusat terkait penambahan armada kapal,” tutup legislator dapil Kalsel itu. ■ jk/sf

**Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Lombok, Nusa Tenggara Barat guna memastikan korban gempa mendapatkan penanganan dengan baik. Tim Kunspek Komisi XI DPR RI mendorong agar bantuan berupa bahan pokok dan akses kredit perbankan yang dipermudah. Pasalnya, akibat gempa 7 skala richter (SR) dari sepuluh kota atau kabupaten di NTB, tujuh diantaranya terkena dampaknya.**

“Untuk pemberian KUR akan dipermudah, untuk *recovery* unit usahanya. Pemerintah juga berjanji memberikan bantuan senilai Rp 50 juta untuk rumah yang rusak berat serta berjanji menanggung biaya hidup selama tiga bulan. Tugas kita untuk mengoordinasikan dengan Kementerian Keuangan agar program tersebut berjalan

**Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas uluran tangan Pemerintah Venezuela kepada korban tsunami dan gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Hal itu ia ungkapkan saat menerima Duta Besar Venezuela untuk Indonesia Gladys Fransisca Urbaneja Duran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (09/10).**

Hekal mengatakan, meskipun Venezuela tengah dilanda krisis ekonomi, namun masih berusaha memberikan bantuan untuk Indonesia. Seperti diketahui, Presiden Venezuela Nikolas Maduro menyetujui penggunaan dana solidaritas sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 151 miliar untuk penanggulangan bencana di Sulteng.

“Ini juga bukan pertama kalinya Venezuela mengulurkan tangan. Saat tsunami Aceh, Presiden Hugo Chavez juga memberikan bantuan sebesar 2 juta dolar AS. Tolong sampaikan ucapan terima



# Korban Gempa Lombok Harus Ditangani dengan Baik

dengan maksimal,” tutur Soepriyatno saat pertemuan dengan Pemprov NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan Bank NTB Syariah di Lombok, NTB, Kamis (04/10).

Mengenai pembangunan Hunian Sementara (Huntara), legislator Partai Gerindra itu berharap lebih dipercepat dan diperbanyak lagi. Perbankan nasional juga harus ikut andil dalam membangun Huntara melalui dana *Corporate Social and Responsibility* (CSR), sehingga alokasi dana CSR tersebut sangat bermanfaat bagi para korban gempa yang kehilangan rumahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mengapresiasi



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno

Foto: Riyar/hr

Bank BRI yang telah memberikan kelonggaran terhadap debitur yang terkena dampak gempa tersebut, dengan

tidak membayar bunga dan cicilan di bulan Agustus.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bank BRI. Hal tersebut sangatlah bermanfaat dan meringankan beban korban gempa. Saya harap, OJK dapat menyeragamkan aturan, sehingga tidak hanya BRI, bank-bank lain juga dapat mengikuti program tersebut,” tutur legislator Partai Demokrat itu.

Ditemui secara terpisah, Gubernur NTB Zulkiflimansyah berharap Komisi XI DPR RI dapat membantu meringankan beban korban gempa di NTB dengan relaksasi kredit bagi korban gempa. “Tentu yang terkena dampak gempa ini sangat luas, termasuk dunia usaha. Semoga dunia usaha mendapatkan relaksasi kredit, karena mereka butuh pemulihan pascagempa ini. Semoga Komisi XI dan OJK juga bisa membantu mewujudkannya,” tutur Zulkifli. ■ rh/mh

# DPR Apresiasi Bantuan Venezuela Untuk Korban Bencana Sulteng



Anggota BKSAP DPR RI Mohamad Hekal menerima kunjungan Duta Besar Venezuela untuk Indonesia Gladys Fransisca Urbaneja Duran

Foto: Kresno/hr

kasih kami kepada Pemerintah Venezuela,” kata Hekal kepada Dubes Venezuela Gladys Fransisca Urbaneja Duran.

Legislator Partai Gerindra ini berharap

kerja sama Indonesia - Venezuela semakin erat seiring bertambahnya usia ke-59 tahun ini. Karena itu, ia menyampaikan rencana kunjungan Grup Kerja Sama

Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Venezuela untuk menjembatani *pending matters* antar kedua negara.

“Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini, Venezuela mengalami guncangan ekonomi dan politik, sehingga persahabatan Venezuela dan Indonesia sempat tertunda. Karena itu, kunjungan ke Venezuela dalam rangka meningkatkan dialog dan isu internasional yang menjadi perhatian bersama,” papar Hekal.

Legislator dapil Jawa Tengah itu menambahkan, kerja sama yang terjalin dengan Venezuela harus terus ditingkatkan. Sama halnya dengan Indonesia, Venezuela juga kaya akan minyak dan mineral sehingga peluang kerja sama ekonomi bisa didorong.

“Mereka mengharapkan Indonesia bisa berpartisipasi di ekonomi mereka. Peluang lainnya, menurut Dubes, budaya Venezuela dan masyarakat Indonesia juga mirip. Sehingga ini bisa menjadi daya tarik untuk mempromosikan budaya kita melalui pariwisata,” imbuhnya. ■ ann/sf

# Seminar MKD Harus Lahirkan Aturan Lembaga Etik

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adies Kadir menginginkan adanya satu *output* atau aturan yang mengatur agar lembaga etik berperan pada lembaga dan institusi di Republik Indonesia. Menurutnya, agar seluruh lembaga etik dapat berperan lebih baik, maka hal-hal pengaturan di dalamnya perlu segera dirumuskan ke dalam suatu peraturan undangan, agar semuanya dapat berjalan di koridornya masing-masing.

persamaan persepsi terkait pengawasan internal dan eksternal di semua lembaga,” ungkapnya.

Terkait apakah etika Anggota DPR RI saat ini sudah cukup baik atau belum, Adies sendiri mengatakan bahwa karakteristik Bangsa Indonesia itu berpedoman pada Pancasila, UUD 1945, dan juga kepada budaya Indonesia. Indonesia memiliki budaya sopan santun, dimana di dalamnya terdapat tata cara berbicara dan tata krama bersikap.

“Semuanya harus sesuai pada tempatnya. Itu semua harus juga dipertimbangkan untuk menjadi bagaimana kita pejabat publik ini mempunyai etika yang baik,” tandas legislator dari Jawa Timur itu.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashidqie yang menjadi pakar di diskusi panel sesi pertama dengan tema “Menyamakan Persepsi Tentang Etika Pejabat Publik” mengatakan, perlu adanya pemahaman antara pejabat publik dengan pejabat penyelenggara negara.

Jimly menjelaskan, pejabat publik adalah pejabat yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ia memberi contoh, pejabat publik itu termasuk juga advokat dan notaris di dalamnya. Meskipun keduanya adalah swasta, namun karena jabatan mereka menyangkut kepentingan umum, maka mereka juga disebut sebagai pejabat publik.

“Jadi saya rasa dibedakan 2 hal, pejabat penyelenggara negara dalam arti luas, dengan pejabat publik dalam arti yang lebih luas. Dan pejabat penyelenggara negara itu pejabat publik juga,” katanya sembari berharap seminar ini dapat berhasil menyatukan persepsi tentang pentingnya menata dan membangun sistem etika berbangsa dan bernegara.

“Dan ujungnya kita harapkan itu diadopsi jadi kebijakan resmi melalui UU. Dan mudah-mudahan pihak pemerintah juga bisa diyakinkan untuk mendapatkan kesadaran yang sama, bahwa sistem etika ini sama pentingnya dengan sistem hukum,” tutupnya. ■ ndy/sf



Foto: Jayadi/hr

Wakil Ketua MKD DPR RI Adies Kadir memberikan sambutan pada Seminar Nasional MKD bertema “Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik”

“Jadi kita ingin ada suatu *output* yang bisa dijadikan satu aturan di dalam suatu peraturan perundang-undangan, tentang bagaimana lembaga etik di lembaga-lembaga negara entah itu di eksekutif dan legislatif ke depan,” katanya usai membuka Seminar Nasional MKD bertema “Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik” di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (08/10).

Adies menjelaskan, lembaga etik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lembaga etik internal dan eksternal. Adies menambahkan, aturan yang ada saat ini hanya mengatur lembaga etik eksternal, yaitu Komisi Yudisial,

Ombudsman RI, dan Kompolnas. Tetapi untuk aturan lembaga etik internal seperti Mahkamah Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung, Komite Dewan Etik di KPK dan juga MKD di DPR RI itu belum ada aturannya.

Sama halnya, dengan belum adanya lembaga etik di beberapa instansi kementerian atau lembaga, yang menurut legislator Partai Golkar itu, diperlukan untuk mengawasi etika pejabat publik yang ada di instansi tersebut.

“Di kementerian belum kita lihat ada lembaga etik. Siapa yang mengawasi? Memang DPR pengawas, tetapi kita tidak bisa menindak mereka. Jadi hal-hal inilah memang yang harus dicarikan



# BURT Nilai RS MIKA Surabaya Layak Sebagai Provider Jamkestama



Foto: Oji/hr

Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Nurhayati Monoarfa berfoto bersama Direksi RS MIKA Surabaya

DPR RI dan keluarganya. Hubungan RS MIKA Surabaya dengan Jasindo sudah berjalan dengan baik melalui pola komunikasi berkala, secara periodik mereka bertemu.

Direktur RS MIKA Surabaya Jeanny Suryatin dalam presentasinya mengemukakan bahwa pihaknya sudah memiliki database Anggota DPR RI beserta keluarganya secara lengkap. Hal ini sebagai wujud kesiapan RS MIKA Surabaya yang ditunjuk Jasindo sebagai mitra dalam layanan Program Jamkestama.

“Dalam beberapa kesempatan,

kami juga sudah pernah melayani penanganan medis kepada Anggota DPR RI dan keluarganya dengan baik,” ungkap Jeanny sembari berharap kerja sama dan komunikasi yang baik dengan Jasindo terus terjalin dan pihaknya berkomitmen akan meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPR RI dan keluarganya dalam memperoleh layanan medis yang prima.

Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS MIKA Surabaya ini juga diikuti oleh Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing (Golkar), Wakil Ketua BURT DPR RI Elva Hartati (PDI-Perjuangan), Agung Budi Santoso (Demokrat), dan Novita Wijayanti (Gerindra).

Sejumlah Anggota BURT DPR RI yang turut hadir diantaranya Rendy Lamadjido (PDI-Perjuangan), Ribka Tjiptaning (PDI-Perjuangan), Gatot Sudjito (Golkar), Venny Devianti (Golkar), Katherine Oendoen (Gerindra), Sayed Abubakar Assegaf (Demokrat), Bakri (PAN), Nasim Khan (PKB) dan Ansori Siregar (PKS). ■ oji/sf

**Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nurhayati Monoarfa menilai Rumah Sakit Mitra Keluarga (RS MIKA) Surabaya, Jawa Timur, sudah cukup layak sebagai RS provider yang dipilih Jasindo, untuk melayani peserta Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), khususnya bagi Anggota DPR RI dan keluarganya.**

Menurutnya, RS MIKA Surabaya sudah memenuhi persyaratan sebagai provider Jasindo karena memiliki peralatan medis yang cukup lengkap dan didukung tenaga medis spesialis dari berbagai latar belakang keahlian. RS tipe B ini didukung berbagai fasilitas, seperti *brain and spine center*, laparaskopi, angiologi untuk pemasangan ring jantung dan sebagainya.

“Menurut saya, RS ini sudah sangat lengkap dan teknologinya juga saya melihat sudah memenuhi persyaratan, baik dari aspek peralatan maupun tenaga medisnya dan ruangan VVIP-nya

juga sudah memenuhi standar,” tukas Nurhayati usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan jajaran Direksi RS MIKA di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/10).

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, RS MIKA Surabaya juga menerima rujukan dari beberapa RS di sekitar Surabaya, untuk penanganan bedah otak dan tulang. Jadi menurutnya sudah cukup layak RS ini menjadi RS Provider Program Jamkestama.

Di sisi lain, legislator daerah pemilihan Jawa Barat itu juga berharap Jasindo harus terus meningkatkan layanan Jamkestama kepada Anggota





Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri Annual Meeting (Pertemuan Tahunan) International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Bali, Senin (08/10). Foto: Arief/hr



Pimpinan Komisi IV DPR RI menerima aspirasi terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pelarangan alat tangkap ikan dari Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) di Gedung DPR RI, Rabu (10/10). Foto: Jayadi/hr



Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima kunjungan Budget Center Parlemen Korea Selatan di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Selasa (9/10). Foto: Kresno/hr